

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNTUK INSTITUSI
(STUDI KASUS PADA POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR)**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNTUK INSTITUSI
(STUDI KASUS PADA POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR)**

OLEH

MUH. ARFAN CHANDRA

10573 03954 12

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Pada
Program Studi Strata 1 Akuntansi



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Akuntansi Sektor Publik untuk Institusi
(Studi Kasus pada Politeknik Pariwisata Makassar)

Nama Mahasiswa : **Muh. Arfan Chandra**
No Stambuk/NIM : 10573 03954 12
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

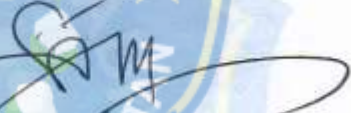
Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui :

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Hj. Rullaty, MM
NIDN : 0009095406


Abd. Salam HB., SE., M.Si., Ak.CA., CSP
NIDN: 0931126607

Mengetahui :

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Imaji, Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA., CSP
NBM: 1073 428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln.Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866872 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **MUH. ARFAN CHANDRA NIM : 10573 03954 12**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 145/ Tahun 1440 H/ 2019 M. Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM
(WD/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Ismail Bedollah, SE.,M.Si.,Ak.CA.CSP 
2. Saida Said, SE.,M.Ak. 
3. Wa Ode Rayyani, SE.,M.Si.,AK.,CA 
4. Asriati, SE.,M.Si. 

Dibahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE.,MM
NIM : 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Arfan Chandra

Stambuk : 10573 03954 12

Jurusan : Akuntansi

Dengan judul : Implementasi Akuntansi Sektor Publik untuk Institusi (Studi Kasus pada Politeknik Pariwisata Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

MATERAI
TEMPEL
65760AFF9C7196472
5000
Mun. Arfan Chandra

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasidoh, SE, MM

NBM: 003078

Dr. Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP

NBM: 1073428

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah 216)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q.S Al-Insyirah 6-7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

- ✚ Ibu dan Bapakku (Masniah Suni dan Chandra Ramang), yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.
- ✚ Kakak dan Adikku (Ayu, Shindy, Nurul dan Iqbal) terimakasih telah memberiku motivasi dan terimakasih sudah sayang sama saudaramu ini yang banyak maunya.
- ✚ Ilma, yang telah memberiku semangat. Terimakasih atas Support dan dukungannya.
- ✚ BTPB Society dan GAM+ yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, makasih buat persahabatannya. Kalian adalah sahabat terbaikku.

ABSTRAK

MUH. ARFAN CHANDRA, 2019. Implementasi Standar Akuntansi Sektor Publik Untuk Institusi (Studi Kasus Politeknik Pariwisata Makassar). Program studi Akuntansi Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh (Hj Ruliaty, selaku pembimbing I dan Abdul Salam, selaku pembimbing II).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengungkapan, penyajian dan pelaporan keuangan Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Makassar telah sesuai dengan prinsip Akuntansi Sektor Publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian dengan data kualitatif yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Politeknik Pariwisata Makasar telah mengimplementasikan akuntansi sektor publik yang sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kata kunci : Implementasi SAP, Pengumpulan data, Politeknik Pariwisata Makassar



ABSTRACT

MUH. ARFAN CHANDRA, 2019. *Implementation of Public Sector Accounting Standards for Institutions (Case Study of Makassar Tourism Polytechnic). Accounting study program at the Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by (Hj Ruliaty, as mentor I and Abdul Salam as mentor II).*

The purpose of this study was to determine the disclosure, presentation and financial reporting of Tourism Polytechnic (POLTEKPAR) Makassar in accordance with the principles of Public Sector Accounting. The method used in this research is descriptive analysis method with a qualitative approach that is research with qualitative data which is then processed and analyzed for conclusions. Data collection methods used are using observation, interview and documentation techniques.

Based on the results of the study indicate that the Makassar Tourism Polytechnic has implemented public sector accounting in accordance with the principles of Government Accounting Standards.

Keywords : *Implementation of SAP, Data Collection, Makassar Tourism Polytechnic*



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **Implementasi Akuntansi Sektor Publik Untuk Institusi (Studi Kasus Pada Politeknik Parriwisata Makassar)**. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada ayahandaku Chandra Ramang dan Ibuku Masniah Suni yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih, dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Serta tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Ruliaty, MM selaku pembimbing I yang senantiasa meluangka waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, memberikan masukan yang tak bosan-bosannya, membina yang tak henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tanpa adanya kendala, begitu pula Bapak Abdul Salam, SE., M.Si. Ak. CA selaku pembimbing II yang telah berkenaan membantu dalam penyusunan skripsi, membenarkan kesalahan penulis, memberikan masukan dan motivasi yang dapat menjadikan skripsi ini selesai tanpa adanya kendala.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Para staf karyawan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh staff di Politeknik Pariwisata Makassar.
6. Kepada teman-teman Mahasiswa Akuntansi angkatan 2012 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya kelas AK 9 12. Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan kita selama ini yang penuh keceriaan dan saling membantu, terima kasih atas persahabatan kita selama ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq fastabiqul kahirat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 26 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	6
1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan	7
2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas	18
3. PSAP 03 Laporan Arus Kas	18
4. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan	18
5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan	19
6. PSAP 06 Akuntansi Investasi	19
7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap	19
8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan	19
9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban	20
10. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian	20
11. PSAP 12 Laporan Operasional	20
12. PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum . 21	
B. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan	21
C. Akuntansi Sektor Publik.....	23
D. Tinjauan Empiris	37

BAB III. METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Instrumen Penelitian	45
F. Defenisi Operasional	46
G. Teknik Analisis data.....	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
B. Pelaporan Keuangan di Politeknik Pariwisata Makassar.....	59
BAB V. SARAN DAN KESIMPULAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tinjauan Empiris	37
Tabel 4.1	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	66
Tabel 4.2	Aset Lainnya	66
Tabel 4.3	Laporan Realisa Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.....	67
Tabel 4.4	Neraca Per 31 Desember 2017 dan 2016	68
Tabel 4.5	Laporan Operasional Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.....	69
Tabel 4.6	Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.....	71
Tabel 4.7	Rincian Estimasi Dan Realisasi Pendapatan.....	73
Tabel 4.8	Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016.....	74
Tabel 4.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017	77
Tabel 4.10	Perbandingan realisasi Belanja TA 2017 dan 2016.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi dan Job Description 53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu kebijakan strategis di Indonesia saat ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003). Akuntabilitas ini kemudian berdampak pada upaya terciptanya *Good Governance*. *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana Investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Hal ini menjadi penting dikarenakan selama ini akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintah di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu faktornya adalah maraknya praktek *fraud* yang terjadi diberbagai instansi pemerintah. Oleh karenanya diperlukan suatu standar baku pelaporan kinerja pemerintah terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah standar akuntansi keuangan sektor publik.

Standar akuntansi keuangan sektor publik memberi kerangka agar fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Siklus tersebut meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan

pertanggungjawaban publik. Standar akuntansi yang telah digunakan di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar-standar tersebut merupakan acuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait.

Akuntansi sektor publik memiliki peran yang penting dalam menyajikan laporan keuangan yang baik sebagai perwujudan dari akuntabilitas publik yang berpengaruh langsung pada pengambilan keputusan dan menilai kinerja organisasi. Organisasi sektor publik dituntut membuat laporan keuangan yang eksternal (Mardiasmo 160:2010).

Penerapan SAKSP kemudian akan menghasilkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintahan yang lebih baik, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik. Sementara itu, peramalan serta penganggaran menjadi lebih *trusted*, sama baiknya dengan manajemen terhadap sumber daya ekonomis dan kewajiban.

Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP) dapat meningkatkan kualitas dan realibilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal ini organisasi pemerintahan. Selain itu, dapat meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan, serta mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama.

Mochammad Syaafi Adriansyah (2013) dalam penelitiannya tentang Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada

Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang) mengemukakan bahwa: penerapan system akuntansi Badan Layanan Umum pada BAUK Universitas Negeri Malang adalah: a) sistem pencatatan menggunakan *double entry* sesuai dengan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang di amanatkan pada PMK 76/PMK.05/2008, b) basis akuntansi menggunakan basis akrual, c) laporan keuangan sudah sesuai SAK dan SAP.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Urip Santoso dan Yohanes Joni Pambelum (2008) tentang Pengaruh Penerapan Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dalam Mencegah *fraud*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencegah *fraud* maka harus diadakan pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah.

Penelitian juga dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengetahuan pengelola Unit Akuntansi Pengelola Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E1) dan Unit Akuntansi Pengelola Pengguna Barang (UAPPB) dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Penelitian lainnya dilakukan Pamungkas (2012) tentang Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan penerapan superfisi mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti bahwa pentingnya suatu entitas publik untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, yang kemudian berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Oleh karenanya peneliti bermaksud untuk mencari tahu apakah standar pelaporan keuangan tersebut sudah secara menyeluruh diimplementasikan di Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Makassar. Judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Implementasi Akuntansi Sektor Publik Untuk Institusi (Studi Kasus pada Politeknik Pariwisata Makassar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Apakah pengungkapan, penyajian dan pelaporan keuangan pada Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Makassar telah sesuai dengan prinsip Akuntansi Sektor Publik.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui pengungkapan, penyajian dan pelaporan keuangan Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Makassar telah sesuai dengan prinsip Akuntansi Sektor Publik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dan menambah ilmu pengetahuan, serta sebagai sarana dalam menerapkan teori-teori yang pernah diperoleh sebelumnya.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca khususnya mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan pada entitas publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Sampai dengan tahun 2003, SAP menggunakan *cash basis*, sedangkan dari tahun 2004 sampai 2014, SAP menggunakan *cash toward accrual basis* (basis kas menuju akrual). SAP berbasis kas menuju akrual ini adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah, maka pada tahun 2010 diterbitkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mewajibkan penggunaan akuntansi berbasis akrual. Kemuadian sejak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual (*accrual basis*) dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Transaksi dicatat menggunakan *accrual basis*
2. Aset diukur menggunakan *historical cost*
3. Depresiasi untuk aset tetap
4. *Accrual basis* pada pendapatan dan beban
5. *Cash basis* pada Laporan Realisasi Anggaran
6. *Full disclosure*

Referensi utama untuk SAP berbasis akrual ini adalah *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Terdapat kerangka konseptual dan 13 PSAP untuk SAP berbasis akrual ini, yaitu:

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tujuan pelaporan keuangan pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peran prediktif dan prospektif, yang menyediakan informasi untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam *Exposure Draft* Standar Akuntansi Pemerintahan (per 04 Februari 2004) adalah *dual basis*. Yang dimaksud dengan *dual basis* adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan neraca menggunakan menggunakan basis akrual.

Penggunaan *dual basis* tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah diwajibkan membuat neraca yang hanya dapat dibuat dengan

akuntansi berbasis akrual, sedangkan disisi lain juga wajib membuat laporan realisasi anggaran atau yang dulu dikenal dengan nama Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas. Terlepas dari basis akuntansi mana yang dipakai, tulisan ini akan membahas jenis-jenis basis akuntansi yang ada dalam praktek, baik pada sektor privat maupun sektor publik termasuk pemerintahan.

Jenis-jenis Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Selain kedua basis akuntansi tersebut terdapat banyak variasi atau modifikasi dari keduanya, yaitu modifikasi dari akuntansi berbasis kas, dan modifikasi dari akuntansi berbasis akrual. Jadi dapat dikatakan bahwa basis akuntansi ada 4 macam, yaitu:

- a. Akuntansi berbasis kas (*cash basis of accounting*);
- b. Modifikasi dari akuntansi berbasis kas (*modified cash basis of accounting*);
- c. Akuntansi berbasis akrual (*accrual basis of accounting*);
- d. Modifikasi dari akuntansi berbasis akrual (*modified accrual basis of accounting*).

Pembagian basis pencatatan (akuntansi) ini bukan sesuatu yang mutlak, dalam *Government Financial Statistic (GFS)* yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund (IMF)* menyatakan bahwa basis pencatatan (akuntansi) dibagi menjadi 4 macam, yaitu *accrual basis*, *due-for-payment basis*, *commitments basis*, dan *cash basis*.

a. Akuntansi Berbasis Kas

Prinsip akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran (*Statement of Receipts and Payment*) atau Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*). Selain itu perlu dibuat suatu catatan atas laporan keuangan atau *notes to financial statement* yang menyajikan secara detail tentang item-item yang ada dalam laporan keuangan dan informasi tambahan seperti:

1. Item-item yang diakui dalam akuntansi berbasis akrual, seperti aktiva tetap dan utang/pinjaman;
2. Item-item yang biasa diungkapkan dalam akuntansi berbasis akrual, seperti komitmen, kontinjensi, dan jaminan;
3. Item-item lain, seperti informasi yang bersifat prakiraan (*forecast*).

Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Secara rinci pengakuan item-item dalam laporan realisasi anggaran, sesuai dengan *Exposure Draft* PSAP Pernyataan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan
3. Dana Cadangan diakui pada saat pembentukan yaitu pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud. Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan.
4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Akuntansi berbasis kas ini tentu mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi, dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada

kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang; laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan, karena tidak terdapat pencatatan secara *double entry*; tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (*cost of service*) sebagai alat untuk penetapan harga (*pricing*), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja.

b. Modifikasi dari Akuntansi Berbasis Kas

Basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas, namun dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode tertentu (*specific period*) misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan. Penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu (periode sebelumnya). Arus kas pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.

Laporan keuangan dalam basis ini juga memerlukan pengungkapan tambahan atas item-item tertentu yang biasanya diakui dalam basis akuntansi akrual. Pengungkapan tersebut sangat beragam sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai tambahan atas item-item yang diungkapkan dalam basis kas, ada beberapa pengungkapan yang terpisah atas saldo *near-cash* yang diperlihatkan dengan piutang-piutang yang akan diterima dan utang-utang yang akan dibayar selama periode tertentu dan *financial assets and liabilities*. Sebagai contoh

Pemerintah Malaysia menggunakan *specified period* dalam laporan keuangan tahunan, yang mengungkapkan beberapa catatan (*memo*) mengenai : aktiva, investasi, kewajiban, utang pemerintah (*public debt*), jaminan (*guarantees*), dan *notes payable*.

Dalam basis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Fokus pengukuran di bawah basis ini adalah pada sumber keuangan sekarang (*current financial resources*) dan perubahan-perubahan atas sumber-sumber keuangan tersebut. Basis akuntansi ini mempunyai fokus pengukuran yang lebih luas dari basis kas, pengakuan penerimaan dan pembayaran kas tertentu selama periode spesifik berarti bahwa terdapat informasi mengenai pituang dan hutang, meskipun tidak diakui sebagai aktiva dan kewajiban.
2. Kriteria pengakuan atas penerimaan selama periode tertentu adalah bahwa penerimaan harus berasal dari periode yang lalu, namun penerapan ini tidak seragam untuk semua negara. Beberapa pemerintah menganggap bahwa seluruh penerimaan yang diterima selama periode tertentu adalah berasal dari periode sebelumnya, sedangkan pemerintah yang lain mengakui hanya beberapa dari penerimaan tersebut.
3. Penetapan panjangnya periode tertentu bervariasi antara beberapa pemerintah, namun ada beberapa ketentuan, yaitu:
 - a. Periode tertentu diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun;
 - b. Periode tertentu harus sama untuk penerimaan dan pembayaran kas;

- c. Kriteria yang sama atas pengakuan penerimaan dan pembayaran kas selama periode tertentu harus diterapkan untuk seluruh penerimaan dan pembayaran;
 - d. Satu bulan adalah waktu yang tepat, karena pembelian barang secara kredit umumnya diselesaikan dalam periode tersebut, periode tertentu yang terlalu lama mungkin mengakibatkan kesulitan dalam menghasilkan laporan keuangan;
 - e. Kebijakan akuntansi yang dipakai harus diungkapkan secara penuh (*fully disclosed*).
- c. Akuntansi Berbasis Akrual

Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non publik dan lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan. *International Monetary Fund* (IMF) sebagai lembaga kreditur menyusun *Government Finance Statistics* (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debiturnya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi basis akrual ini menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh

arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, *in-kind transaction*, dan arus ekonomi lainnya.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan (*user*) maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan. Manfaat tersebut antara lain:

1. Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya;
2. Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya;
3. Menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan;
4. Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. Memungkinkan *user* untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya dan dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya;
6. Membantu *user* dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya ke atau melakukan bisnis dengan entitas;
7. *User* dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut.

Sesuai dengan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akrual untuk neraca berarti bahwa aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima

atau dibayar. Secara rinci pengakuan atas item-item yang ada dalam neraca dengan penerapan basis akrual adalah:

1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Investasi, suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria: (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
3. Aktiva tetap, untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), suatu benda berwujud harus diakui sebagai KD jika: (a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; (b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan (c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi: (1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan (2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
 5. Kewajiban, suatu kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- d. Modifikasi dari Akuntansi Berbasis Akrua
- Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun. Contoh bervariasi (modifikasi) dari akuntansi akrual, dapat ditemukan dalam praktek sebagai berikut ini:
1. Pengakuan seluruh aktiva, kecuali aktiva infrastruktur, aktiva pertahanan dan aktiva bersejarah/warisan, yang diakui sebagai beban (*expense*) pada waktu pengakuisisian atau pembangunan. Perlakuan ini diadopsi karena praktek yang sulit dan biaya yang besar untuk mengidentifikasi atau menilai aktiva-aktiva tersebut;

2. Pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual, namun pengakuan pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi dari basis kas;
3. Pengakuan hanya untuk aktiva dan kewajiban finansial jangka pendek;
4. Pengakuan seluruh kewajiban dengan pengecualian kewajiban tertentu seperti utang pensiun.

Beberapa penyusun standar telah mengidentifikasi kriteria atas waktu pengakuan pendapatan dengan akuntansi berbasis akrual, sebagai contoh Pemerintah Kanada mengakui pendapatan dalam periode di mana transaksi atau peristiwa telah terjadi ketika pendapatan tersebut dapat diukur (*measurable*). Pemerintah Federal Amerika Serikat (*State*) mengakui pendapatan pajak dalam periode akuntansi di mana pendapatan tersebut menjadi *susceptible to accrual* (yaitu ketika pendapatan menjadi *measurable* dan *available* untuk mendanai pengeluaran). *Available* berarti dapat ditagih dalam periode sekarang atau segera setelah terjadi transaksi.

Basis akuntansi mana yang dipakai oleh suatu pemerintah tertentu, tergantung pada kebijakan dan kondisi yang ada. Masing-masing basis akuntansi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, basis akuntansi akrual memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan basis akuntansi yang lain, baik bagi pemerintah sendiri sebagai penyusun laporan keuangan maupun bagi pengguna laporan keuangan (*user*). Pemerintah Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara, sudah harus menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh paling lambat tahun 2008.

2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Tujuan Standar Laporan Realisasi Anggaran adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. PSAP 03 Laporan Arus Kas

Informasi arus kas berguna sebagai indikator arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan. Tujuan laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas dalam suatu periode tertentu.

4. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan.

5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Tujuan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

6. PSAP 06 Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, dan *royalty* atau manfaat sosial. Tujuan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 12 bulan. Tujuan manfaat standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama aset tetap adalah perlakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali serta penurunan nilai tercatat aset tetap.

8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Tujuan standar konstruksi dalam pengerjaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pengerjaan dengan metode nilai historis. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk: 1. Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan. 2. Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca. 3. Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa yang lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur akuntansi kewajiban saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi dan biaya peminjaman yang membebankan terhadap kewajiban tersebut. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan seharusnya. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan ataupun periode sebelumnya. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

10. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintah dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan

11. PSAP 12 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam

pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;

- a. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan
- b. kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

12. PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

BLU sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dengan menggunakan SAP berbasis akrual. Sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan BLU dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

B. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)

KSAP juga telah menerbitkan IPSAP (Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) yang merupakan klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir penggunaan PSAP.

Selain itu, KSAP juga telah menerbitkan beberapa Buletin Teknis yang merupakan informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP dan/atau IPSAP.

Dengan SAP berbasis kas menuju akrual, laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan hanya empat laporan, yaitu: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun pada SAP berbasis akrual, laporan keuangan yang harus dibuat ada tujuh, yaitu:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

C. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Bastian (2010:3) mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta. Selain diterapkan pada lembaga-lembaga tersebut, akuntansi sektor publik juga diterapkan pada institusi pemerintahan yang bergerak di bidang pendidikan. Halim (2007:252) mengatakan akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan.

Akuntansi sektor publik merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, serta pembuatan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan/lembaga/organisasi baik itu swasta maupun negeri yang digunakan untuk menyediakan informasi keuangan untuk pihak-pihak yang membutuhkan pada saat mengambil sebuah keputusan.

2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi domain pada publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan, komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Akan tetapi untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta (Mardiasmo, 2009).

3. Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang tujuannya tidak mencari laba/ keuntungan atau nirlaba (non profit motive). Organisasi sektor publik dapat dilihat dari arti luas dan arti sempit yaitu :

- a. Organisasi sektor publik dalam arti luas, yaitu organisasi yang tujuannya tidak mencari laba/keuntungan atau nirlaba yang meliputi instansi pemerintah, organisasi nirlaba milik pemerintah, dan organisasi nirlaba milik swasta.

- b. Organisasi sektor publik dalam arti sempit atau arti khusus, yaitu instansi pemerintah saja. Organisasi sektor publik dapat dengan mudah dikenali dari ciri utamanya yaitu nirlaba (tidak mencari laba/keuntungan) atau nonprofit motive.

4. Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Pada tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya 'politisasi' atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan 'sapi perah' oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989).

5. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Glynn (1993) dalam Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada sektor publik adalah untuk:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

6. Pencatatan akuntansi sektor publik

Terdapat beberapa metoda atau teknik pencatatan akuntansi yang dikenal atau biasa dipraktikkan dalam akuntansi sektor publik, yaitu:

- a. Akuntansi anggaran (*budgetary accounting*)
- b. Akuntansi kas (*cash accounting*)
- c. Akuntansi akrual (*accrual accounting*)
- d. Akuntansi komitmen (*commitment accounting*)
- e. Akuntansi dana (*fund accounting*)

Kelima metoda tersebut pada prinsipnya tidak saling meniadakan, artinya jika sudah dipilih satu metoda tertentu maka tidak berarti teknikyang lain tidak dapat dilakukan. Bahkan dimungkinkan dalam satu organisasi sektor publik digunakan beberapa metoda akuntansi tersebut secara bersamaan. Pemilihan pendekatan pencatatan akuntansi dipengaruhi oleh tujuan dan manfaat yang hendak diperoleh organisasi.

a. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan pencatatan akuntansi atas alokasi anggaran dan estimasi pendapatan sehubungan dengan pelaksanaan APBN dan

APBD. Akuntansi anggaran digunakan dalam organisasi sektor publik terkait dengan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Informasi LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. LRA juga bermanfaat dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Adapun tujuan utama akuntansi anggaran adalah untuk pengendalian anggaran. Akuntansi anggaran memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengelolaan dan monitoring anggaran sehingga dapat diketahui tingkat serapan anggaran, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas anggaran serta kondisi keuangan negara.

a) Terminologi Dalam Akuntansi Anggaran

Terdapat beberapa terminologi atau istilah terkait dengan transaksi yang spesifik dalam akuntansi anggaran pemerintah, yaitu:

- 1) Aprosiasi (*Appropriation*) : merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran.
- 2) Otorisasi Kredit Anggaran (*Allotment*) : adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari aprosiasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum Negara /Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.

- 3) *Encumbrance* : merupakan komitmen atau kewajiban yang terjadi sehubungan dengan dikeluarkannya order pembelian kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa.

b) Pencatatan Akuntansi Dalam Akuntansi Anggaran

Pada pemerintah pusat, pencatatan akuntansi anggaran dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan oleh pimpinan kementerian/ lembaga melalui sistem akuntansi instansi (SAI). Pencatatan akuntansi anggaran pada Bendahara Umum Negara dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pencatatan akuntansi anggaran pada Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU).

- 1) Pencatatan Akuntansi Anggaran pada Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara Subsistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN): mencatat akuntansi APBN untuk membukukan estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tercantum dalam APBN. Selain pencatatan APBN, Sistem Akuntansi Umum Negara juga mencatat akuntansi realisasi anggaran dan jurnal penutupan pada akhir periode akuntansi.
- 2) Pencatatan Akuntansi Anggaran pada Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara Subsistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) : Subsistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tidak melakukan pencatatan akuntansi APBN karena sudah dicatat dalam SAKUN. Namun SAU dan SAI sama-sama melakukan penjurnalan atas akuntansi DIPA sedangkan SAKUN tidak mencatat akuntansi DIPA (Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran). Akuntansi DIPA dilakukan untuk membukukan estimasi pendapatan yang dialokasikan, bagian (*allotment*) belanja, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, dan bagian pengeluaran pembiayaan untuk suatu unit kerja kementerian Negara/lembaga. Selain mencatat akuntansi DIPA, SAU dan SAI juga mencatat akuntansi realisasi anggaran unit kerja bersangkutan, serta jurnal penutup.

b. Akuntansi Kas

Akuntansi kas merupakan teknik pencatatan akuntansi yang paling tua dalam sejarah akuntansi yang sudah dilakukan selama berabad-abad bahkan ribuan tahun yang lalu. Hingga saat ini pun akuntansi kas masih banyak digunakan di organisasi sektor publik maupun nonprofit. Akuntansi kas mencatat transaksi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo kas dalam buku kas.

a) Kelebihan Akuntansi Kas:

1. Sederhana,
2. Mudah dipahami dan diaplikasikan,
3. Obyektif dalam melaporkan kas, dan
4. Sangat bermanfaat untuk pengendalian kas.

b) Kelemahan Akuntansi Kas:

1. Tidak mencatat utang, piutang, dan aset tetap secara akurat
2. Laporan keuangan yang dihasilkan tidak komprehensif
3. Tidak dapat menggambarkan kinerja organisasi secara lebih baik
4. Tidak dapat mengaplikasikan depresiasi aset tetap

5. Tidak memisahkan antara penerimaan kas dari perolehan pendapatan dengan dari utang
 6. Tidak memisahkan antara pengeluaran kas untuk belanja operasional yang merupakan (*expense*) dengan belanja modal (*capital expenditure*) yang dikapitalisasi menjadi aset
 7. Lebih sulit diaudit
 8. Lebih mudah dimanipulasi
- c. Akuntansi Akrual

Akuntansi akrual merupakan teknik pencatatan akuntansi yang secara luas digunakan pada organisasi bisnis. Namun demikian, saat ini organisasi sektor publik dan nonprofit juga didorong untuk menggunakan akuntansi akrual. Akuntansi akrual mengakui transaksi pada saat terjadinya, yaitu ketika sudah terjadi perpindahan hak dan kewajiban, bukan berdasarkan diterima atau dikeluarkannya kas. Tujuan pengaplikasian akuntansi akrual pada sektor publik pada dasarnya berbeda dengan sektor bisnis. Pengaplikasian basis akrual dalam sektor publik bermanfaat dalam menentukan biaya pelayanan dan penentuan harga/tarif pelayanan.

Pengaplikasian akuntansi akrual dalam sektor bisnis terutama dimaksudkan untuk membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan sedangkan pada sektor publik untuk penandingan biaya dengan manfaat. Maraknya penggunaan akuntansi akrual pada sektor publik antara lain disebabkan karena adanya tekanan reformasi akuntansi sektor publik yang mendorong dilakukannya pengelolaan keuangan publik secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif.

d. Akuntansi Komitmen

Akuntansi komitmen mencatat transaksi lebih awal dibandingkan akuntansi akrual dan akuntansi kas. Suatu komitmen diakui pada saat berikut:

1. Ketika dikeluarkan order pembelian barang atau jasa
2. Ketika dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak kerja
3. Ketika diperlukan dana yang dicadangkan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang

Akuntansi komitmen segera mencatat transaksi seawal mungkin, yaitu pada saat terjadi komitmen untuk melakukan suatu pengeluaran di masa datang bukan pada saat barang atau jasa diterima atau dibayar.

e. Akuntansi Dana

Dalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan mengenai kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Penggunaan akuntansi dana pada akuntansi pemerintahan di Indonesia memungkinkan dilakukan karena dalam sistem anggaran pemerintah terdapat beberapa program spesifik yang memerlukan pertanggungjawaban dana program sehingga sumber dan penggunaan dana serta saldo dana program perlu dibuat secara terpisah.

Akuntansi dana merupakan metoda pencatatan akuntansi yang memisahkan sumber daya dalam beberapa kategori dana untuk mengidentifikasi sumber dan penggunaan dana. Adapun tujuan akuntansi dana adalah untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana, penentuan kondisi finansial, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

7. Penyajian/pelaporan akuntansi sektor publik

Jenis laporan keuangan sektor publik yang minimal dan terintegrasi, meliputi:

- a. Laporan Posisi Keuangan.
- b. Laporan Kinerja Keuangan.
- c. Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto.
- d. Laporan Arus Kas.
- e. Kebijakan Akuntansi dan Catatan atau Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan diatas merupakan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik.

Laporan realisasi anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan apa yang telah dianggarkan dan dengan realisasi periode sebelumnya. Neraca menyajikan asset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya sehingga pemakai laporan keuangan akan mempunyai gambaran bagaimana posisi keuangan organisasi sektor publik.

Berbagai persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik di Indonesia, meliputi:

1. Pelaporan akuntansi harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan
2. Penyediaan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomidan alokasinya .
3. Penyuguhan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil yang dicapai.
4. Pemasokan informasi membiayai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Penyediaan informasi berkaitan dengan sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun panjang.
6. Pemberian informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
7. Pengembangan sistem dan standar akuntansi diorganisasi sektor publik berdasarkan system pencatatan double entry dengan basis akrual.

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca atau laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang, dan modal pemilik selama suatu periode tertentu. Secara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukan pos-pos yang menyajikan jumlah:

- 1) Properti, pabrik dan peralatan
- 2) Aktiva tidak berwujud
- 3) Aktiva keuangan(selain butir (4),(6) dan (8)
- 4) Investasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas
- 5) Persediaan
- 6) Pemulihan transaksi nonpertukaran,termasuk pajak dan transfer
- 7) Piutang dari transaksi pertukaran
- 8) Kas dan setara kas
- 9) Utang pajak dan transfer
- 10) Utang karena transaksi pertukaran
- 11) Cadangan
- 12) Kewajiban tidak lancer
- 13) Partisipasi minoritas
- 14) Aktiva/ekuitas neto.

b. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)

Laporan Kinerja keuangan atau disebut juga dengan Laporan Pendapatan dan Biaya, Laporan Surplus-Rugi, Laporan Operasi, Laporan Surplus-Defisit atau Laporan Laba Rugi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama atau satu periode tertentu.

Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut:

- 1) Pendapatan dari aktivitas operasi
- 2) Surplus atau deficit dari aktivitas operasi
- 3) Biaya keuangan (pinjaman)
- 4) Surplus atau deficit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas
- 5) Suplus atau deficit dari aktivitas biasa
- 6) Pos-pos luar biasa
- 7) Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto
- 8) Surplus atau deficit neto untuk periode.

c. Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto

Laporan perubahan aktiva menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perubahan aktiva secara keseluruhan menyajikan total surplus/deficit neto selama suatu periode.

Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto ini meliputi:

- 1) Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
- 2) Saldo akumulasi surplus dan deficit pada awal periode, pada tanggal pelaporan, dan pergerakan selama periode.

- 3) Pengungkapan komponen asset/ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen asset/ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan dan kegiatan investasi. Informasi arus kas sangat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar estimasi kemampuan entitas.

e. Catatan atas Laporan Sektor Publik

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan entitas publik harus mencakup hal-hal berikut:

- (1) Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Undang-Undang APBN/Perda APBD
- (2) Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- (3) Kebijakan Akuntansi
- (4) Penjelasan tentang perkiraan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas

A. Laporan Realisasi anggaran

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer

4. Pembiayaan

B. Neraca

1. Asset lancar
2. Investasi jangka panjang
3. Asset tetap
4. Asset lainnya
5. Kewajiban jangka pendek
6. Kewajiban jangka panjang
7. Ekuitas dana lancar
8. Ekuitas dana investasi

C. Laporan arus kas

1. Arus kas dari aktivitas operasi
2. Arus kas dari aktivitas investasi asset nonkeuangan
3. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
4. Arus kas dari aktivitas nonanggaran

(5) Pengungkapan lainnya

Pengungkapan ini berisi hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan antara lain:

- a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan
- b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru
- c. Kontijensi
- d. Komitmen
- e. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan
- f. Kejadian yang mempunyai dampak sosial

- g. Kejadian penting setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara signifikan terhadap akun yang disajikan dalam neraca.

D. Tinjauan Empiris

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti / Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Indra Franselski Sampel, Lintje Kalangi, dan Treesje Runtu (2015)	Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrua	Kesiapan pemerintah Kota Manado dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Manado dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Manado dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Manado diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sebaiknya perlu diadakan kembali sosialisasi dan bimbingan teknis oleh pemerintah pusat

			kepada SKPD terkait.
2.	Friska Langelo, David Paul Elia Saerang, dan Stanly Winylson Alexander (2015)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung	Pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP. No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrua!. Terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi yang sesuai dan pengadaan sosialisasi serta bimbingan teknik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan transparan.
3.	Fitria Ayu Lestari Niu, Herman karamoy, dan Steven Tangkuman (2014)	Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu	DPPKAD Kota Kotamobagu belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. SAP berbasis kas menuju akrua! menyajikan 2 laporan keuangan yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran sedangkan SAP berbasis akrua! menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas,

			<p>laporan perubahan SAL dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya, DPPKAD Kota Kotamobagu telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 dan mengadakan sosialisasi serta bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.</p>
4.	<p>Ni Made Ari Widyastuti, Edy Sujana, dan I Made Pradana Adipura (2015)</p>	<p>Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual</p>	<p>Pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Kabupaten Gianyar belum menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh, namun sudah menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Di tahun 2015, pemerintah Kabupaten Gianyar dituntut menerapkan secara penuh akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai amanat PP No. 71 tahun 2010.</p>
5.	<p>Surepno (2015)</p>	<p>Kunci Sukses dan Peran Strategis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual Pemerintah Kota Semarang didukung oleh empat strategi utama yaitu komitmen pimpinan, pengembangan regulasi, pengembangan</p>

			<p>sistem informasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Pelaku implementasi menunjukkan akuntansi berbasis akrual memiliki peran strategis dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan.</p>
6.	<p>Halen, Astuti, Dwi Diana (2013)</p>	<p>Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan Accrual Basis dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di kabupaten Jember (Studi Kasus pada Dinas Pemerintahan Kabupaten Jember)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (pemahaman, pelatihan, dan pendampingan) secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (penerapan basis akrual).</p>
7.	<p>Usman, Sunandar, dan Ida Farida (2014)</p>	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan akuntansi akrual di Pemerintah masih sangat rendah. Khususnya tingkat implementasi akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan. Namun, tidak ada efek</p>

			signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas konsultasi teknologi informasi, dukungan, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan ukuran unit kerja terhadap tingkat pelaksanaan akuntansi akrual.
8.	Ardiansyah dan Atmini, S (2012).	<i>Factors Affecting The Affecting The Readiness Of PP No.71 Tahun 2010 About Government Accounting Standards (Case Study on Working Units in KPPN Malang's Working Area)</i>	Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia dan komunikasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Namun Penelitian ini tidak mampu menemukan bukti adanya pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.
9.	Rizkianci, Anggi. (2016).	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan ekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelatihan, Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Variabel Pelatihan, Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan, tetapi Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi

			Pemerintahan Berbasis Akrua.
10.	Sampel, Kalangi, dan Runtu, T. (2015).	Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrua	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Manado dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrua merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Manado dalam menerapkan SAP berbasis akrua. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Manado dalam implementasi SAP berbasis akrua. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Manado diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan data kualitatif yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Metode deskriptif menurut Sugiyono adalah: “Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Selain itu, Sugiono juga mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi kemudian membandingkannya dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian di Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Makassar. Poltekpar Makassar yang dahulu

dikenal dengan Akademi Pariwisata (AKPAR) Makassar, merupakan satu satunya perguruan tinggi kepariwisataan yang berstatus negeri di kawasan timur Indonesia dan telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional (BAN) dengan tenaga pelajar S1, S2 dan S3 serta berpengalaman dalam dan luar negeri.

Waktu penelitian untuk memperoleh data dan informasi akan dilaksanakan selama 2 bulan setelah diterbitkan surat izin penelitian, yakni dimulai pada bulan Desember 2018 sampai dengan Januari 2019.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan metode wawancara, observasi, dan persediaan kuisisioner.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder sumber data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal dilakukan sebagai usaha penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh data data yang relevan dengan tujuan penelitian maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung pelaku-pelaku yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang memahami tujuan-tujuan dilaksanakannya suatu penelitian dan pengamatan secara kritis dan cermat. Observasi dilakukan untuk mengamati hal-hal yang kurang disadari oleh lain. Observasi merupakan metode yang paling mudah dalam pengumpulan data dan informasi bila dibandingkan dengan metode yang lain.

2. Wawancara

Wawancara yaitu tanya-jawab yang dilakukan penulis dengan karyawan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui peninggalan tertulis, berupa dokumen, arsip, atau laporan-laporan tahunan di kantor yang bersangkutan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah orang atau lembaga yang dimintai keterangan mengenai masalah yang akan diteliti. Teknik pengambilan instrumen adalah merupakan cara yang digunakan dalam memperoleh data primer untuk bahan penelitian instrumen ini diambil dari beberapa unsur.

Adapun instrumen yang terlibat pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pimpinan di Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Makassar
2. Staf Keuangan Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Makassar
3. Pihak dan/atau staf lainnya yang terkait dengan penelitian.

F. Defenisi Operasional

1. Akuntansi Sektor Publik Institusi

a. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam *Exposure Draft* Standar Akuntansi Pemerintahan (per 04 Februari 2004) adalah *dual basis yaitu* pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan neraca menggunakan menggunakan basis akrual.

b. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

c. PSAP 03 Laporan Arus Kas

Informasi arus kas berguna sebagai indikator arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

d. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

e. PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

BLU sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dengan menggunakan SAP berbasis akrual. Sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan BLU dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

2. Laporan keuangan sektor publik

SAP menggunakan *cash toward accrual basis* (basis kas menuju akrual). SAP berbasis kas menuju akrual ini adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sejak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual (*accrual basis*) dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Transaksi dicatat menggunakan *accrual basis*
2. Aset diukur menggunakan *historical cost*
3. Depresiasi untuk aset tetap
4. *Accrual basis* pada pendapatan dan beban
5. *Cash basis* pada Laporan Realisasi Anggaran
6. *Full disclosure*

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut

Sugiyono (2009:207) “metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

Metode analisis data yang digunakan dimulai dengan mengumpulkan data dan menyaring keterangan-keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa laporan dan catatan keuangan di POLTEKPAR Makassar meliputi laporan kinerja keuangan (neraca), laporan keuangan kinerja (surplus-defisit), serta laporan arus kas, kebijakan-kebijakan tertulis sehubungan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual serta laporan keuangan yang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Makassar

Politeknik Pariwisata Makassar sebelum namanya Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata [BPLP] diresmikan tanggal 18 September 1991 oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Ujung Pandang, yang saat itu dijabat oleh bapak Susilo Soedarman [alm] berdasarkan atas surat keputusan menteri parpostel No.KM.24/OT.001/MPPT-91 Tentang Pembentukan BPLP Medan dan BPLP Ujung Pandang.

Pemrakarsa pendirian BPLP adalah Bapak Prof. Dr. Ahmad Amiruddin Gubernur Sulawesi Selatan. Kesepakatan mendirikan BPLP di Ujung Pandang dengan maksud untuk menjawab kekurangan tenaga profesional dibidang kePariwisata. Bapak Gubernur Sulsel didukung secara moril dan materil oleh kakanwil departemen Pariwisata, pos dan telekomunikasi propinsi Sulsel oleh bapak acep Hidayat dan pengusaha dibidang Pariwisata Sulawesi Selatan.

Tahun demi tahun mulai dari masa perkenalan sampai dengan masa perkembangan global dewasa ini, akademi Pariwisata Makassar tetap mempertahankan eksistensinya. Untuk mengenal lebih jauh kilas balik Politeknik Makassar, dapat dilihat pada sejarah perkembangannya, dibawah ini :

- 1991 Balai pendidikan dan latihan Pariwisata [BPLP] ujung pandang didirikan, dengan program sertifikat.
- 1992 BPLP membuka empat program sstudi, yakni : kantor depan, tata graha. Tata hidangan, tata boga dengan jenjang Diploma II

- 1994 BPLP meluluskan alumni program Diploma II pertama dan selanjutnya membuka program Diploma 2 Usaha Perjalanan Wisata dan Diploma III [D III] lanjutan [1 tahun] dari program Diploma II [D II], perhotelan, melakukan pelatihan usaha Pariwisata dan manajemen kePariwisata kepada pegawai Negeri sipil dikawasan timur Indonesia.
- 1996 Membuka jenjang diploma III [D III] dengan program studi manajemen divisi kamar [MDK], Manajemen tata hidangan [MTH], Manajemen tata boga, [MTB], manajemen usaha perjalanan [MUP]. Tahun ini juga dilakukan kerjasama dengan Britain council dalam hal bantuan tenaga pengajar.
- 1997 Balai pendidikan dan Pariwisata, berubah menjadi akademi Pariwisata Ujung Pandang sesuai dengan KM.27/OT.001/MPPT-97saat itu juga dilaksanakan kerjasama dengan JICA dan ALLINCE Francaaise antara lain dalam hal bantuan tenaga kerja pengajar sarana pembelajaran. Menjaln kerjasama dengan institute Tecknology of MARA [Malaysia] dalam penugasan tenaga pengajar.
- 1998 Akademi Pariwisata ujung pandang yang semula dibawah Departemen Pariwisata, pos dan telekomunikasi berubah menjadi departemen Pariwisata seni dan budaya menjalin kerja sama dengan AUSAID melalui tenaga pengajar.
- 2000 Akademi Pariwisata Makassar ditunjuk oleh AUSAID khususnya Makassar tourism training project sebagai pilot project [MTTP] selama empat tahun, dalam menerapkan pelatihan dan pengujian berbasis kompetensi dibidang Pariwisata dan sekaligus mengirim 12 dosen untuk belajar di Canberra Institute Technology-Australiaa.

- 2003 Akademi Pariwisata Makassar yang semula dibawah departemen Pariwisata seni dan budaya menjadi kementerian kebudayaan dan Pariwisata.
- 2008 Akademi Pariwisata Makassar pindah dari kampus lama bertempat di jl.cendrawasih No.259 ke kampus baru yang beralamat di jl.Gunung rinjani kota mandiri tanjung bunga Makassar. Melakukan kerjasama dalam penyusunan RIPPDA untuk kawasan timur Indonesia pada umumnya dan khususnya disulawesi selatan antara lain pemkab wajo dan pemkab selayar.
- 2009 Akademi Pariwisata Makassar juga melakukan kerjasama dalam pembuatan RIPPDA untuk kawasan timur Indonesia pada umumnya dan khususnya disulawesi selatan dengan pemkab enrekang. Membuka program diploma IV berafiliasi dengan sekolah tinggi Pariwisata nusa dua bali.
- 2011 Akpar Makassar memperoleh sertifikasi ISO 9001-2008
- 2012 Akpar Makassar mengembangkan afiliasi dengan STP Nusa Dua Bali dengan membukaa jenjng program Diploma IV, program studi manajemen konveksi dan perhelatan [MKH]. Program ini dikenal dengan istilah MICE & Even management.
- 2013 Akpar Makassar melaksanakan Re-akreditasi oleh BAN-PT dan Visitasi Akreditasi Tourism Education Quality [Tedqual] oleh Themis foundation UNWTO.
- 2015 Akpar Makassar berubah menjadi Politeknik Makassar sesuai dengan peraturan menteri Pariwisata republic Indonesia nomor 15 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja polikteknik Pariwisata Makassar.

2. Visi dan Misi

a. Visi

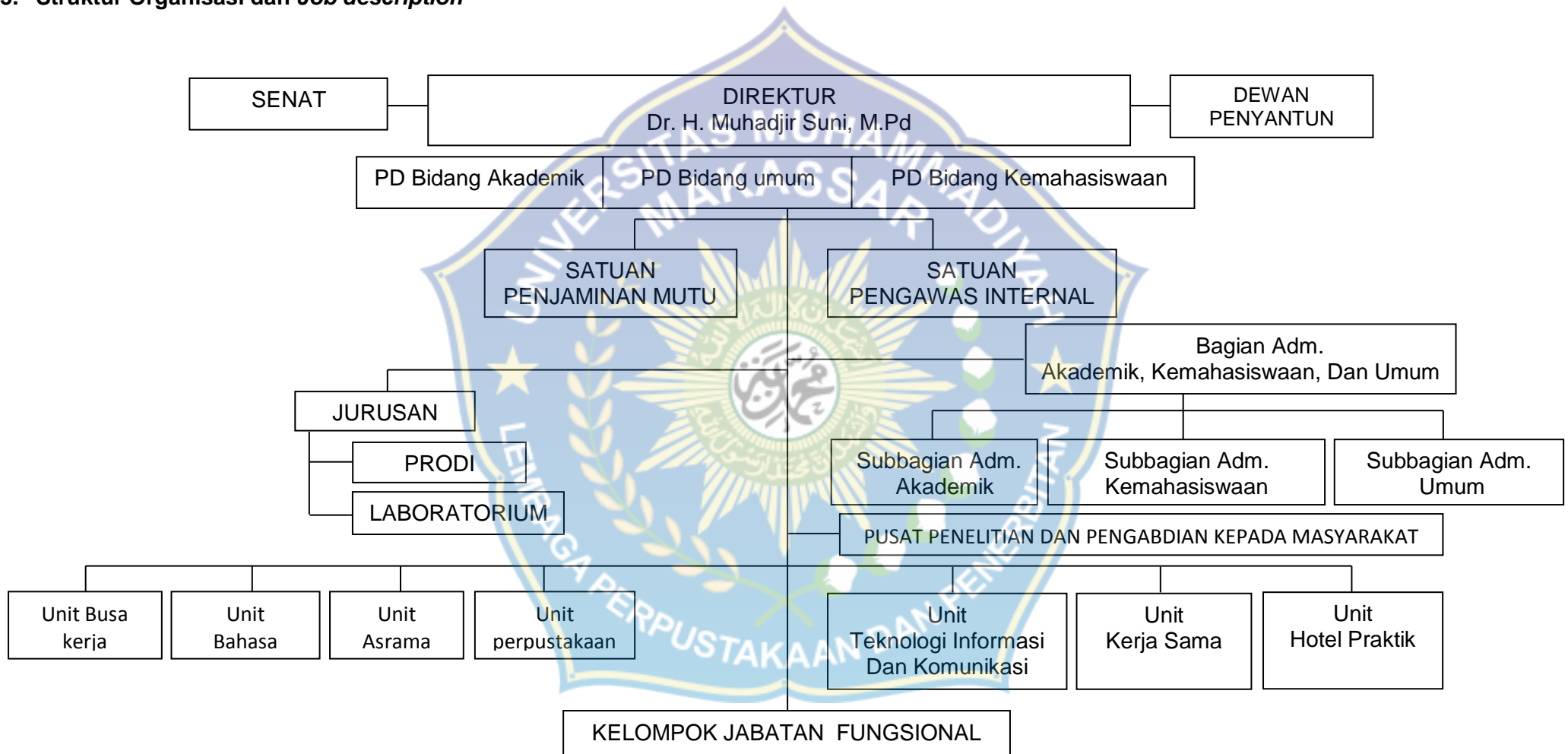
Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi KePariwisata yang Berstandar Internasional dan berkepribadian Indonesia.

b. Misi

1. Menghasilkan SDM Pariwisata yang mempunyai daya saing internasional dan berkepribadian Indonesia.
2. Mengembangkan penelitian kePariwisata berskala internasional yang berbasis pada pengetahuan, budaya dan lingkungan local.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui inovasi teknologi tepat guna, karifan local, dan kelestarian lingkungan.



3. Struktur Organisasi dan *Job description*



4. *Job Description*

a. Struktur Organisasi / Kepegawaian

Berdasarkan peraturan menteri Pariwisata republic Indonesia Nomor : 15 Tahun 2015 tertanggal 20 oktober 2015 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Pariwisata Makassar. Politeknik Pariwisata Makassar merupakan perguruan tinggi dilingkungan kementrian Pariwisata yang dipimpin oleh seorang Direktur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab lngsung kepada Deputi Bidang pengembangan kelembagaan kePariwisataan. Pembinaan Politeknik Pariwisata Makassar secara teknis akademik oleh Dirjen pendidikan tinggi dan pembinaan teknis operasional oleh deputi bidang pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

a) Direktur

Politenik Pariwisata Makassar dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh 3 (tiga) orang pembantu direktur, masing-masing Pembantu Direktur Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan di Alumni. Direktur Politeknik Parawisata Makassar adalah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa tenaga administrasi akademik dan hubungan dengan lingkungan.

b) Pembantu Direktur

a. Pembantu Direktur I bidang akademik adalah tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi

akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan serta kerja sama.

- b. Pembantu Direktur II merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
 - c. Pembantu Direktur III merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan kemahasiswaan serta alumni.
 - d. Pembantu Direktur IV merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang kerja sama daan penjamin mutu.
- c) Senat Akademi

Senat Politeknik Parawisata Makassar adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Politeknik Makassar yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan poltekpar Makassar;
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademik;
3. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Poltekpar Makassar;

4. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Poltekpar Makassar yang diajukan oleh Direktur Poltekpar Makassar;
5. Menilai pertanggungjawaban Direktur Poltekpar Makassar atas pelaksanaan kebijakan dan pengembangan poltekpar yang telah ditentukan;
6. Merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekpar Makassar;
7. Memberikan pertimbangan kepada Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan KePariwisata berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk menjadi Direktur Poltekpar Makassar;
8. Memberi pertimbangan kepada Direktur Poltekpar Makassar berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan menjadi pembantu Direktur poltekpar Makassar calon-calon Pejabat Struktural/fungsional.

Senat Poltekpar Makassar terdiri atas : Direktur, pembantu Direktur, Ketua Jurusan, dan Wakil Dosen. Senat Poltekpar Makassar dipimpin oleh Ketua yang didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara para anggota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun yang dapat dipilih kembali sesudah masa jabatan berakhir. Senat Poltekpar Makassar bersidang sekurang- kurangnya 2 (dua) kali setahun dan tidak termasuk siding senat yang diadakan untuk penyelenggaraan suatu upacara, misalnya Wisuda ataupun Dies Natalis. Senat Poltekpar Makassar membuat keputusan atas dasar

musyawarah dan mufakat, akan tetapi bilamana disetujui paling sedikit 2/3 dari anggota yang hadir pada sidang yang bersangkutan. Sekretaris Senat Poltekpar Makassar membuat notulen berkenaan dengan hal ikhwal penting yang dibicarakan dalam sidang, dan notulen tersebut disahkan oleh Senat pada permulaan sidang berikutnya.

d) Satuan Penjamin Mutu

Satuan Penjamin Mutu merupakan unsure penjamin mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan dan pengendalian sytem penjamin mutu.

e) Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal merupakan unsure pengawasan non akademik.

f) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum merupakan unsure pelaksana administrasi yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada direktur dan pembinaan sehari-hari oleh [Pembantu Direktur I, dalam hal administrasi akademik dan kerja sama. Pembantu Direktur II dalam hal administrasi umum, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana dan pembantu Direktur III dalam hal ini pelaksanaan kegiatan dan pembinaan kemahasiswaan serta alumni.

g) Jurusan

Jurusan adalah unsur pelaksana Akademik Poltekpar Makassar dalam melaksanakan pendidikan vokasi di bidang kePariwisataan; Jurusan dipimpin oleh ketua Jurusan mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan vokasi tertentu dibidang kePariwisata
antara lain Jurusan, Program Studi dan Laboratorium

Jurusan dan Program Studi meliputi :

a. Jurusan Hospitaliti, terdiri dari :

1. Program Studi Diploma IV (empat) ADH (Administrasi Perhotelan).
2. Program Studi Diploma III (tiga) MDK (Manajemen Divisi Kamar).
3. Program Studi Diploma III (tiga) MTH (Manajemen Tata Hidangan).
4. Program Studi Diploma III (tiga) MTB (Manajemen Tata Boga).

b. Jurusan KePariwisata, terdiri dari :

1. Program Studi Diploma IV MKP (Manajemen KePariwisata).

c. Jurusan Perjalanan, terdiri dari :

1. Program Studi Diploma IV (empat) MKH (Manajemen Konvensi dan Perhotelan)
2. Program Studi Diploma IV (empat) MBP (Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata)

3. Program Studi Diploma III (tiga) MJP (Manajemen Bisnis Jasa Perjalanan Wisata)

h) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang dilaksanakan oleh unsur- unsur pelaksana akademik.

i) Kelompok Dosen

Kelompok Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, pengajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan penalaran, minat, dan kepribadian mahasiswa.

j) Unsur Penunjang

Unsur Penunjang pada Politeknik Makassar terdiri dari :

1. Unit Perpustakaan
2. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Unit Kerja Sama
4. Unit Hotel Praktik
5. Unit Bursa Kerja
6. Unit Bahasa dan
7. Unit asrama

B. Pelaporan Keuangan di Politeknik Pariwisata Makassar

Laporan keuangan yang dikelola oleh Politeknik Pariwisata Makassar, dalam hal ini Laporan Keuangan Tahun 2017, merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

1. Pencatatan dan Pengungkapan Keuangan Politeknik Pariwisata Makassar

a. Basis Akuntansi

Politeknik Pariwisata Makassar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Politeknik Pariwisata Makassar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

c. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata Makassar Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Pariwisata Makassar. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata Makassar adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
2. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
3. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

c) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

c) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- d) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

1. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
2. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

b) Aset Tetap

1. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
2. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
3. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
4. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan

jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

5. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

c) Penyusutan Aset Tetap

1. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan
2. penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
3. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan (KDP), dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
4. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
5. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
6. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik

Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

d) Aset Lainnya

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
2. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Tabel 4.2

Aset Lainnya

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4

3. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

2. Analisis dan Pembahasan

a. Pelaporan Keuangan di Poltekpar

Laporan Keuangan di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar terdiri atas penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini telah sejalan dengan Standar Akuntansi Publik yang tertuang dalam PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun penyajian Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata Makassar adalah sebagai berikut.

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tabel 4.3
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.025.000.000	4.117.822.859	136,13
JUMLAH PENDAPATAN		3.025.000.000	4.117.822.859	136,13
BELANJA	B.2.			
Belanja Pegawai	B.3	14.301.769.000	13.542.186.658	94,69
Belanja Barang	B.4	33.897.406.000	29.592.068.335	87,30
Belanja Modal	B.5	22.000.825.000	21.803.467.000	99,10
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	
JUMLAH BELANJA		70.200.000.000	64.937.721.993	92,50

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.117.822.859; atau mencapai 136,13 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.025.000.000; Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp64.937.721.993; atau mencapai 92,50; persen dari alokasi anggaran sebesar Rp70.200.000.000.

2) Neraca

**Tabel 4.4
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

URAIAN	CATATAN	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	82,637,015
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	1,266,753,427	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(6,333,767)	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.8	1,260,419,660	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	95,194,170	227,152,119
Jumlah Aset Lancar		1,355,613,830	309,789,134
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TCR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1,361,572,276,000	157,331,395,000
Peralatan dan Mesin	C.15	30,054,272,490	27,909,295,290
Gedung dan Bangunan	C.16	97,847,453,468	92,475,068,526
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	10,850,615,720	9,148,932,755
Aset Tetap Lainnya	C.18	741,694,173	741,694,173
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	18,421,723,509	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(26,900,133,246)	(35,609,971,895)
Jumlah Aset Tetap		1,492,587,902,114	251,996,413,849
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	412,841,000	412,841,000
Aset Lain-Lain	C.22	4,231,318	4,231,318
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(340,234,443)	(256,134,193)
Jumlah Aset Lainnya		76,837,875	160,938,125
JUMLAH ASET		1,494,020,353,819	252,467,141,108
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	87,423,275	555,307,758
Hibah Yang Belum Disahkan	C.25a	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	84,337,015
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		87,423,275	639,644,773
JUMLAH KEWAJIBAN		87,423,275	639,644,773
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	1,493,932,930,544	251,827,496,335
JUMLAH EKUITAS		1,493,932,930,544	251,827,496,335
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1,494,020,353,819	252,467,141,108

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.494.020.353.819; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.355.613.830; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.492.587.902.114; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp76.837.875.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp87.423.275; dan Rp1.493.932.930.544;.

3) Laporan Operasional

Tabel 4.5
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

URAIAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4,126,969,311	3,229,140,265
JUMLAH PENDAPATAN		4,126,969,311	3,229,140,265
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	13,067,521,680	12,084,086,433
Beban Persediaan	D.3	3,643,344,349	5,058,961,662
Beban Barang dan Jasa	D.4	16,928,593,606	14,321,200,070
Beban Pemeliharaan	D.5	3,035,157,289	2,368,577,339
Beban Perjalanan Dinas	D.6	6,243,247,182	3,287,289,507
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	5,381,983,899	5,659,654,613
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	6,333,767	(2,746,466)
JUMLAH BEBAN		48,306,181,772	42,777,023,158
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(44,179,212,461)	(39,547,882,893)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		15,100,021	-
Jumlah Surplus(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		15,100,021	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		126,940,888	1,684,831,571
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1,066,110	(5,084,551)
Jumlah Surplus/(defisit) dari kegiatan Non operasional Lainnya		125,874,778	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		140,974,799	1,679,747,020
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(44,038,237,662)	(37,868,135,873)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(44,038,237,662)	(37,868,135,873)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.126.969.311, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp48.306.181.772; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp44.179.212.461). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp140.974.799; dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp44.038.237.662); ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.225.323.772.737; dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp60.819.899.134; sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp1.493.932.930.544;.



4) Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 4.6
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

URAIAN	CATATAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	E.1	251,827,496,335	253,978,424,870
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(44,038,237,662)	(37,868,135,873)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI	E.3	1,225,323,772,737	(167,648,005)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	1,225,747,079,679	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(423,756,942)	(167,648,005)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	450,000	-
JUMLAH		1,225,323,772,737	(167,648,005)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	60,819,899,134	35,884,855,343
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1,242,105,434,209	
EKUITAS AKHIR	E.5	1,493,932,930,544	251,827,496,335

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp251.827.496.335; dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(44.038.237.662) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.225.323.772.737; dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp60.819.899.134; sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp1.493.932.930.544;

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

b. Pencatatan, Pengungkapan dan Penyajian laporan keuangan Politeknik Pariwisata Makassar.

1) Pendapatan-LRA dan Pendapatan LO

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut; Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan, Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa, dan Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.117.822.859; atau mencapai 136,13 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.025.000.000.

Pendapatan Akademi Pariwisata Makassar terdiri dari Pendapatan pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	20,100,021	
Pendapatan Pendidikan	3,025,000,000	3,964,850,000	
Pendapatan Jasa		117,971,306	
Pendapatan Lain-lain	-	14,901,532	-
Jumlah	3,025,000,000	4,117,822,859	136.13

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2017 mengalami kenaikan 8,78 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendaftar dan mahasiswa yang masuk di Akademi Pariwisata Makassar. Selain itu, Pendapatan Jasa dan Pendapatan dari Pengelolaan BMN (pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan bangunan) juga mengalami kenaikan.

Tabel 4.8
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	117,971,306	109,550,000	7.69
Pendapatan Pendidikan	3,964,850,000	3,108,550,000	27.55
Pendapatan Lain-lain	14,901,532	557,445,240	-97.33
Pendapatan Denda	-	-	
Pendapatan dari pengelolaan BMN	20,100,021	10,000,000	101.00
Jumlah	4,117,822,859	3,785,545,240	8.78

2) Pengukuran

Dasar pengukuran yang diterapkan Politeknik Pariwisata Makassar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomii atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar adalah sebagai berikut.

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal
- d) Piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari

entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

- e) Persediaan dicatat sebesar Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- f) Persediaan dicatat sebesar Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah.
- g) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- h) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- i) Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

3) Penyajian

Berikut adalah penyajian akun-akun dalam Laporan Keuangan yang dibuat di Politeknik Pariwisata Makassar.

- a) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- b) Belanja dan Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- d) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - e) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
 - f) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - g) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 - h) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 4) Belanja dan Beban

Untuk pengakuan Belanja, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Realisasi Belanja instansi pada TA 2017 adalah sebesar Rp64.937.721.993; atau 92.50% dari anggaran belanja sebesar Rp70.200.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	14,301,769,000	13,544,882,349	94.71
Belanja Barang	33,897,406,000	29,593,589,335	87.30
Belanja Modal	22,000,825,000	21,803,467,000	99.10
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	70,200,000,000	64,941,938,684	92.51
Pengembalian		(4,216,691)	-
Jumlah	70,200,000,000	64,937,721,993	92.50

Dibandingkan dengan TA2016, Realisasi BelanjaTA 2017 mengalami kenaikan sebesar 63.75% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:-

1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatannya untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2017,
2. Kegiatan belanja barang bertambah dikarenakan kebutuhan bahan penunjang pendidikan mengikuti jumlah bertambahnya mahasiswa.

Tabel 4.10
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	13,542,186,658	11,575,708,611	16.99
Belanja Barang	29,592,068,335	23,226,140,652	27.41
Belanja Modal	21,803,467,000	4,855,201,320	349.07
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	64,937,721,993	39,657,050,583	63.75

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politeknik pariwisata makassar telah mengimplementasikan akuntansi sektor publik yang sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua daerah termasuk Polteknik Pariwisata Makassar menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan politeknik pariwisata makassar dalam implementasi SAP berbasis akrual. Dan keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual di politeknik pariwisata makassar didukung oleh empat strategi utama yaitu komitmen pemimpin, pengembangan regulasi, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan Oleh Indra Franselski Sampel, Lintje Kalangi, dan Treesje Runtu (2015) dengan judul Penelitian yaitu Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual. Kesiapan pemerintah Kota Manado dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Manado dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Manado dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Manado diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sebaiknya perlu diadakan kembali sosialisasi dan bimbingan teknis oleh pemerintah pusat kepada SKPD terkait. Penelitian yang dilakukan oleh Surepno (2015) dengan judul Penelitian yaitu Kunci Sukses dan

Strategis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua, Hasil penelitian Menunjukkan keberhasilan Implementasi akuntansi berbasis akrua Pemerintah Kota Semarang didukung oleh empat strategi utms yaitu komitmen pemimpin, pengembangan regulasi, pengembangan sistem informasi dan pengembangan sumber daya manusia. Pelaku implementasi menunjukkan akuntansi berbasis akrua memiliki peran strategis dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata Makassar telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.
2. Laporan Keuangan di Politeknik Pariwisata Makassar telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Dalam hal ini basis akrual digunakan dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di politeknik pariwisata makassar, maka penulis mengajukan saran kepada :

1. Instansi Politeknik Pariwisata Makassar dalam proses penyusunan laporan keuangan agar dilakukan dengan membuat jadwal dalam proses penyusunannya secara berkala dan adanya pengawasan dalam menyusun laporan keuangan tersebut sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara tepat waktu.
2. Disarankan kepada Politeknik pariwisata makassar dalam proses penyedia laporan keuangan melakukan pemberitahuan di webside

atau situs resmi bahwa laporan keuangan telah di audit oleh BPK dapat dilihat dalam situs resmi Politeknik Pariwisata Makassar.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah dan Atmini, S .2012. *Factors Affecting The Affecting The Readiness Of PP No.71 Tahun 2010 About Government Accounting Standards (Case Study on Working Units in KPPN Malang's Working Area)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol 1 No 1 (2012).
- Ardiansyah, MS. 2013. *Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum: Studi Pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang*.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Franselki Sampel, L. Kalangi, dan T. Runtu. 2015. *Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrua*. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Vol 3, No 1 (2015).
- Halen dan Dwi Diana Astuti .2013. *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan Accrual Basis*. Jurnal Relasi. Vol 18 (2013).
- Herdillah, Heni. 2014. *Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Daerah*, (online), (<http://milamashuri.wordpress.com>) diakses tanggal 16 Juli 2018
- Langelo Friska, David P.E.S, dan Stanly Wylson A., 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Vol 3, No 1 (2015).
- Lestari Ayu, Herman Karamoy, dan Steven Tangkuman. 2014. *Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu*. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Vol 4, No 4 (2014).
- Mardiasmo., 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press
- Nordiawan dan Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta. Salemba Empat.
- Nugraheni dan I Subaweh. 2011. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 13 (1).

Pamungkas. 2012. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Ranggagading 12 (2), 82.

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. *Tentang Standart Akuntansi Pemerintah*.

Pratiwi dan Rike Lulut. 2014. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang)*. Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol 3, No 2.

Rizkianci, Anggi. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau*. Fakultas Ekonomi UMRAH.

Santoso dan YJ Pambelum. 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*. Jurnal Administrasi Bisnis 4 (1).

Surepno. 2015. *Kunci Sukses dan Peran Strategis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI*. Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol 7, No 2 (2015).

Usman, Sunandar, dan Ida Farida .2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi AkruaI pada Entitas Pemerintah Daerah*. Jurnal of Accounting and Investment. Vol 15 No 2 (2014).

Widyastuti, Ni Made, Edy Sujana, dan I Made Pradana Adipura.2015. *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI di Kabupaten Gianyar*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 3 No 1 (2015).

_____. *Manfaat Standar Akuntansi Sektor Keuangan Publik*. (online), (<https://www.akuntansionline.id>) diakses tanggal 19 Juli 2018.

_____. 2010. *Modul Akuntansi Sektor Publik*.

_____. 2010. *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*.

RIWAYAT HIDUP



Muh. Arfan Chandra panggilan Arfan, lahir di Enrekang pada tanggal 15 Maret 1994 dari pasangan Bapak Chandra dan Ibu Masniah Suni. Peneliti adalah anak kedua dari lima bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di BTP Blok B no. 534 Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Buntusu Kota Makassar.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Inpres Tamalanrea 4 lulus tahun 2006, SMP Negeri 30 Makassar lulus tahun 2009, SMA Negeri 5 Enrekang lulus tahun 2012, dan mulai tahun 2012 mengikuti program S1 Akuntansi di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH)

